LIPS
PR
9/1'97
HALAMAN 1/6

Gubernur Jabar R. Nuriana: Perlu Dijalin Kemitraan Pengusaha

Tidak Ada PHK di Tasi

TASIKMALAYA, (PR).-

Para pengusaha di Tasikmalaya menyatakan siap untuk segera melakukan kegiatannya seperti sebelum terjadi kerusuhan. Mereka menjamin tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya. Bahkan para pengusaha yang kegiatan bisnisnya belum aktif, tetap akan memberikan hak-hak semestinya kepada karyawannya.

"Kami tidak akan melakukan PHK. Bahkan meski kami belum aktif, karyawan perusahaan kami tetap menerima hak-haknya. Sebab mereka masih menjadi tanggung jawab perusahaan," ujar Hendry Damarjaya dari *Matahari Group* di depan Gubernur Jabar, HR. Nuriana dalam pertemuan antara para pengusaha dengan aparat pemerintah, di Tasikmalaya, Rabu (8/1).

Pada pertemuan tersebut, hadir Bupati Tasikmalaya Suljana WH beserta jajaran Muspida Pemda Kab. Tasikmalaya, pihak perbankan dan perusahaan asuransi.

Seperti diberitakan, peristiwa kerusuhan di Tasikmalaya 26 Desember 1996 lalu, menyebabkan sedikitnya 70 perusahaan/bank/pertokoan rusak dan di antaranya terbakar. Data terakhir menunjukkan tenaga kerja yang belum aktif tinggal 1.604 orang.

Menurut Hendry, dalam waktu dekat pihaknya akan membuka usahanya kembali untuk sementara di Jl. Empang, di atas lahan sekitar 2.000 meter persegi, sebelum gedung permanennya selesai dibangun.

Jaminan serupa juga dikemukakan para pengusaha lainnya. Namun mereka menekankan perlunya diberi beberapa kemudahan, mengingat keadaan darurat yang mereka alami.

Eng Soen, pengusaha taipoka Cap Obeng, misalnya, mengungkapkan tentang pabriknya yang hanya tinggal seperempatnya saja yang tersisa, dari luas seluruhnya satu hektar. "Saya berusaha di sini sudah sekitar 50 tahun. Baru kali ini mengalami kejadian seperti ini," katanya.

"Tiap tahun saya membayar pajak antara Rp 40 sampai Rp 50 juta. Karena kondisi sekarang, saya minta keringanan pajak kepada pemerintah," tuturnya, tanpa mau menyebutkan berapa kerugian yang dia derita.

Eng Soen menjelaskan, setelah kerusuhan itu, banyak petani singkong yang kesulitan menjual hasil tanamannya. "Mereka mendesak kami supaya secepatnya mengaktifkan kembali pabrik," katanya.

Bank mendukung

Sementara itu, sejumlah pimpinan bank menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kredit, baik untuk modal usaha maupun investasi. Asalkan para pengusaha benar-benar memiliki gairah kerja. Pihak bank juga akan menangguhkan penagihan kepada para pengusaha yang menjadi korban kerusuhan.

Disamping itu, pihak perbankan berjanji akan mempermudah dalam pemberian kredit dengan proses dalam waktu singkat. Padahal, dengan proses peminjaman itu biasanya memakan waktu tiga sampai enam bulan.

"Kita mendukung sepenuhnya pemulihan perekonomian di Tasikmalaya. Kami akan memberikan dukungan modal kerja dan investasi. Asalkan memang para pengusaha di sini bisa menunjukkan gairah kerja untuk bangkit kembali," kata Direktur Bank Danamon, Drs. Okky Sugiri.

Hal senada juga dikemukakan pihak pihak Dewan Asuransi Indonesia (DAI) Cabang Bandung, yang akan memberikan pembayaran kepada perusahaan yang berhak menerimanya. Berdasarkan catatan DAI, ada sepuluh perusahaan asuransi yang harus menanggung perusahaan yang menjadi korban kerusuhan.

Dalam kesempatan itu, secara simbolis PT Asuransi Danamon menyerahkan uang pertanggungan sebesar Rp 150 juta kepada perusahaan plastik PT Asiatic Union Perdana.

Pada sisi lain, para pengusaha angkutan di Tasik saat ini mengeluh. Karena disamping puluhan kendaraan mereka rusak, juga toko-toko suku cadang di kota tersebut habis terbakar. "Sehingga kami kebingungan untuk mencari suku cadang," ujar perwakilan dari pengusaha angkutan Ny. Hj. Dedeh.

Dia mengharapkan, agar pihak bank memahami kesulitan para pengusaha angkutan, dan menangguhkan dulu tagihan berikut bunganya atas cicilan kendaraan. Selain itu, diharapkan pula kemudahan untuk memproses surat-surat kendaraan yang baru.

Kemitraan

Menanggapi kesediaan berbagai pihak terkait itu, Gubernur menyambut gembira. Dia menegaskan kembali kebijakannya untuk mempermudah upaya pemulihan kembali kegiatan para pengusaha. Seperti halnya dalam pengurusan izin lokasi, izin gangguan (HO) ataupun IMB.

Kepada para pengusaha, Gubernur menekankan perlunya dijalin kemitraan antara pengusaha besar dengan yang kecil. Misalnya, Toko Matahari menyediakan lahan khusus untuk tempat berjualan bagi pengusaha kecil secara bergantian.

Di Tasikmalaya, kata Gubernur, banyak pengusaha kecil potensial yang perlu dibina secara serius. Padagang kecil itu tidak menetap di tempat tersebut. "Mereka berdagang bergantian, dan nanti diatur oleh Pak Bupati," tuturnya.

Dengan cara seperti itu, katanya, pengusaha besar telah memberi peluang kepada pengusah kecil untuk berkembang. Dalam perkembangan nantinya, akan terbentuk semacam ikatan emosional diantara mereka, dan hambatan sosial akan teratasi.

"Memberi peluang itu mendidik, sedangkan memberi uang tidak mendidik," katanya lagi.

Anjuran Gubernur kemudian disambut pihak Matahari Group dan para pengusaha Tasikmalaya. Pihak Matahari akan menyediakan lahan khusus untuk para pengusaha kecil. "Pola kemitraan harus semakin dikembangkan. Kita harapkan peristiwa serupa tidak terulang lagi, dan memperkokoh kebersamaan," ujar perwakilan dari Bank Danamon.

LIPS
HALAMAN

Menyinggung soal kesulitan suku cadang kendaraan, Gubernur mengatakan, jika memang di Tasik sangat sulit memperoleh suku cadang, pihaknya akan mengimbau agar para pengusaha di Bandung mensuplai suku cadang ke Tasik.

"Bahkan kalau perlu, mereka saya anjurkan untuk membuka distributor sementara di kota ini. Sebab, menjelang lebaran ini kebutuhan akan angkutan sangat besar. Jangan sampai masyarakat nantinya ikut menderita," kata Gubernur.

Dia juga akan segera mengupayakan perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Seperti halnya lampu-lampu lalulintas dan lampu penerangan lainnya.

Menanggapi kebijaksanaan Gubernur Jabar, Ketua Kadin Jabar Jajat Prijatna Purwita menyatakan, penegasan Gubernur yang meyakinkan tentang tidak adanya PHK merupakan langkah strategis dalam upaya pemulihan ekonomi.

Hadir dalam kesempatan ini antara lain, pengurus Kadin Jabar, pengurus DAI Jabar dan Perbanas Jabar.

Agar ditindaklanjuti

Sementara itu kalangan DPR mengharapkan agar pernyataan Pangab Jenderal TNI Feisal Tanjung mengenai telah diketahuinya identitas dalang kerusuhan Tasikmalaya dan Situbondo, ditindaklanjuti dengan proses hukum, agar masyarakat tidak bertanya-tanya dan saling tuduh terhadap timbulnya kerusuhan tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPR (luar negeri, hankam, penerangan) Abu Hasan Sazili (FKP) dan anggota Komisi III (hukum) Handjojo Putro (FPDI) menegaskan hal tersebut kepada pers di Jakarta, Rabu, menanggapi pernyataan Pangab tersebut (PR, 8/1).

Pangab menjelaskan, "aktor intelektual" di balik kerusuhan Tasikmalaya maupun Situbondo kini sudah diketahui identitasnya namun dia menolak untuk mengumumkan kepada pers.

Sazili berpendapat, kalau memang pihak aparat keamanan sudah dapat mendeteksi otak kerusuhan itu, yang penting harus ada tindak lanjutnya untuk diproses secara hukum, tanpa pandang bulu.

"Hendaknya masalah ini jangan hanya menjadi *move* saja, tetapi harus betul-betul segera ditindaklanjuti secara hukum untuk diproses di pengadilan secara terbuka," katanya.

Ia berpendapat, kerusuhan itu tidak semata-mata karena adanya kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Bisa saja kerusuhan tersebut akibat perilaku oknum aparat keamanan yang membuat masyarakat tidak puas, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, ucapnya.

"Tapi siapa kelompok yang mengambil manfaat situasi itu. Hal ini yang perlu kejelasan, apalagi kita mau mengadapi Pemilu, bisa saja ada upaya-upaya untuk menimbulkan instabilitas keamanan," sambung Sazili.

Namun demikian, menurut dia, tindakan itu harus dibuktikan secara hukum, tidak cukup hanya lewat pernyataan atau tuduhan tanpa dasar, seperti penggunaan istilah "dalang".

Sazili menyatakan mendukung, kalau memang ada dalangnya, maka siapapun pelakunya harus dibuktikan dahulu lewat proses peradilan, sesuai aturan yang berlaku.

Anggota Dewan ini berharap, agar berbagai permasalahan kerusuhan akhir-akhir ini hendaknya cepat diselesaikan, termasuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan bagaimana menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan.

Komnas HAM

Wakil Ketua I Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Prof. Dr. Miriam Budiardjo mengatakan, akar kerusuhan sosial yang terjadi di Tasikmalaya 26 dan 27 Desember 1996 disebabkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan.

"Ketidakpuasan itu salah satunya menyangkut ketimpangan ekonomi, dimana terlihat ada orang yang kaya sekali dan di pihak lain miskin sekali," kata Miriam di Jakarta, Rabu.

Faktor ketidakpuasan tersebut, katanya, akhirnya membuat massa di Tasikmalaya menjadi mudah terpicu dan tersulut untuk melakukan tindakan-tindakan beringas seperti merusak, membakar, dan merampok beberapa toko, rumah tinggal, kendaraan, dan kantor polisi.

Ketika berbicara mengenai kemungkinan adanya pihak yang menghasut massa pada peristiwa Tasikmalaya, Miriam mengatakan, "Memang ada yang memanfaatkan situasi seperti itu dan akhirnya memicu kerusuhan."

Namun demikian, ia menolak untuk menyebutkan ciri-ciri orang yang dicurigai menjadi pihak ketiga dan menyulut massa untuk melakukan kerusuhan.

"Sebelum ada data pasti, kami tidak bisa menyebutkan siapa orang atau pihak yang menjadi penyulut, tapi kami mempunyai indikasi ke arah itu," katanya.

Komnas HAM sendiri melalui pernyataan yang ditandatangani ketuanya, Munawir Sjadzali dan Sekjen Baharuddin Lopa menduga adanya pihak ketiga yang menggerakkan kerusuhan sosial di Tasikmalaya.

Dugaan tersebut muncul berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan Komnas HAM, antara lain adanya spanduk dan selebaran yang menghasut rakyat untuk turun ke jalan.

Menurut Wakil Ketua II Marzu Darusman, Komnas HAM melihat bahwa ciri-ciri seperti itu mendahului terjadinya kerusuhan.

"Jadi peristiwa saat itu bukan kejadian mendadak, tapi sudah ada persiapan sebelumnya," kata Marzuki di Jakarta, Rabu.

Pelanggaran HAM

Sementara itu, melalui pengumumannya, Komnas HAM menyimpulkan bahwa kerusuhan sosial di Tasikmalaya berawal dari pelanggaran HAM oleh oknum-oknum Polres Tasikmalaya terhadap tiga orang santri setempat.

Pelanggaran HAM tersebut berupa penganiayaan fisik dan sebagai akibatnya timbul serangkaian pelanggaran HAM lain yang justru dilakukan oleh massa yang tidak terkendali.

Mengenai massa yang tidak terkendali, Marzuki Darusman mengatakan, hal itu disebabkan lemahnya daya antisipasi dan koordinasi dari aparat keamanan. "Sebenarnya saat itu ada orang yang berwenang membuat kebijaksanaan untuk mengontrol situasi, namun sayang koordinasi di antara aparat kurang berjalan dengan baik," katanya.

Massa yang tidak terkendali, seperti diumumkan Komnas HAM, menimbulkan serangkaian pelanggaran HAM berupa pelanggaran terhadap hak milik karena melakukan perusakan, pembakaran dan perampokan toko-toko, rumah tinggal, pabrik, kendaraan dan gedung milik pemerintah --khususnya kantor-kantor polisi. Pelanggaran lain adalah dalam hal kebebasan beragama karena massa merusak dan membakar rumah ibadah.

Tewasnya beberapa orang korban tidak bersalah maupun korban lukaluka dianggap Komnas HAM sebagai pelanggaran hak untuk hidup *(the right to life)* dan hak perlindungan jasmani *(protection from bodily harm)*.

Pelanggaran terhadap hak untuk mendapatkan pekerjaan *(right to work)* juga disebutkan oleh HAM karena massa yang tidak terkendali telah menyebabkan lebih dari 12.000 orang kehilangan mata pencaharian sehari-hari.

Pelanggaran lain adalah pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk membangun *(national right for development)* karena kerusuhan menyebabkan terganggunya proses pembangunan nasional di daerah yang bersangkutan. Seluruh pelanggaran tersebut, dikatakan Komnas, telah melanggar hak bebas dari ketakutan *(freedom from fear)* karena menimbulkan rasa takut yang mencekam pada masyarakat tertentu.***